

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

- Ahmad Nashih Luthfi, D. (2009). *KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA: YANG DIINGAT DAN YANG DILUPAKAN*. Yogyakarta: STPN Yogyakarta.
- Basarah, Moch., 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Munsyarief. (2013). *MENUJU KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH: KASULTANAN DAN PAKUALAMAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. Yogyakarta: Ombak CV
- Noer Fauzi, D. (2000). *Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah : Pergeseran Politik di Bawah Problem Agraria*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Putra, F. (2006). *Gerakan Sosial: Konsep, strategi, aktor, hambatan dan tantangan gerakan sosial di Indonesia*. Malang: Averroes Press.
- Reilly B, H. P. (2000). *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. Jakarta: AMEEPRO.
- Ruchiyat, E. (1999). *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rusdi. (2012). *Konflik Sosial (Dalam Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo)*. Yogyakarta: STPN Press.
- Rusmadi Murad, S. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soetiknjo, Iman. (1994). *Politik Agraria Nasional : Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Sumardjono, M.S.W., Ismail, N., dan Isharyanto, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Buku Kompas.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Syarbaini, S. (2009). *Dasar-dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Syarief, Elza, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Gramedia.

Tarrow, S. (1994). *Power in Movement : Social Movements, collective action and politics*. New York: Cambridge University Press.

Usman, Rachmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Cetakan Ke-2, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Wirayuda, A. W. (2011). *Dari Klaim Sepihak Hingga Land Reform (Konflik Penguasaan Tanah Di Surabaya 1959-1967)*. Yogyakarta: STPN Press.

b) Undang Undang

Indonesia, R. (1960). *Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria*. Sekretaris Negara. Jakarta: Sekretaris Negara.

Indonesia, R. (2012). *Undang Undang nomor 13 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Yogyakarta, D. I. (2016). *Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*. Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

c) Jurnal

Efendi, D. (2015). Collective Identity and Protest Tactics in Yogyakarta Under The Post-Suharto Regime. *Journal of Government and Politics* vol. 6 no. 2.

Jati, W. R. (2014, maret). POLITIK AGRARIA DI YOGYAKARTA :IDENTITAS PARTRIMONIAL & DUALISME HUKUM AGRARIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 11, 25-37.

d) Artikel elektronik

Harianjogja.com. (2016, Juni 25). *SULTAN GROUND : Perjanjian Kraton dan Pemkab Tuai Kritik*. Yogyakarta, Indonesia.

Karto Wiyatno, R. S. (2016, Mei 27). Festival Kathok Abang: Watu Kodok Melawan Investor. Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.

Tempo, N. (2013, desember 10). *Warga Yogyakarta Sah Tanahnya Jadi Sultan Ground*. Yogyakarta.

Selamatkanbumi.com. (2016, Juni 24). *(Indonesia) Penertiban dan penataan tanah Sultan Ground: Mengapa negara mau dan bisa dikontrol keraton?* Yogyakarta.